

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Pendidikan

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu istilah kontemporer yang dikenal dan digunakan banyak organisasi, baik organisasi yang digunakan banyak orang ataupun individu. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹⁵ Menurut Terry, manajemen adalah proses, yakni aktivitas yang terdiri dari empat sub aktivitas yang masing- masing merupakan fungsi fundamental, keempat subyektivitas itu yang dalam manajemen adalah Planning, (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggiatan), controlling (pengawasan).

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Seluruh aset dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilan, serta pengalaman

¹⁵ Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), hlm 623

mereka, maupun mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan.¹⁶

Magginson, Mosley dan Piettri menjelaskan pengertian bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan sumber daya keuangan, dan fasilitas fisik lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses kerjasama itu nampak dalam fungsi-fungsi perencanaan, penorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Sedangkan menurut manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

2. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya

¹⁶ Suprihanto,J,(2018). Manajemen. UGM PRESS.

¹⁷ Iskandar, J. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan, Jurnal Idaarah, Vol. III, NO. 1, JUNI 2019. Hlm. 115

termasuk kegiatan, perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan biasanya oleh manager keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.¹⁸ Menurut Komariah dkk, manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.¹⁹

Menurut Bambang Riyanto, manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas usaha dalam mendapatkan pendaan dengan biaya seminimal mungkin dengan syarat yang paling menguntungkan dan menggunakan dana tersebut se-efisien mungkin. Sedangkan Sudana mendefinisikan manajemen keuangan sebagai salah satu bidang manajemen fungsional yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang hingga pengelolaan modal kerja perusahaan dalam investasi maupun pendanaan jangka pendek.²⁰

¹⁸ Suryana, D. (2008). Manajemen Keuangan Sekolah. Jakarta: Erlangga, 2008, h. 2

¹⁹ Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan" Jurnal Al-Afkar, Volume 6 Nomor 1, April 2018, 72-74

²⁰ Samsurijal Hasan, dkk. Manajemen Keuangan. CV. Pena Persada Redaksi Jawa Tengah. 2022, Hlm. 3

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah seluruh rangkaian pendanaan yang mencakup pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada lembaga pendidikan atau perusahaan. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban Keuangan nampaknya mempunyai peran yang signifikan dalam suatu lembaga apapun, khususnya lembaga pendidikan.

Mujamil Qomar mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian pada keuangan, yaitu: pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan menjadi gagal dan berantakan jika tidak didukung oleh keuangan yang memadai. kedua, lazimnya keuangan itu sulit sekali didapatkan dalam jumlah yang besar khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.²¹

Menurut Sulisyorini pada jurnal yang ditulis oleh Syaifulloh MS dengan judul “Manajemen Keuangan Pendidikan” manajemen keuangan merupakan tindakan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.²²

²¹ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

²² Syaifulloh MS. *Manajemen Keuangan Pendidikan*, 2021. Hlm. 12-13

Menurut Sulistryorini dalam perencanaan manajemen keuangan, kepala sekolah harus mampu menyusun rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui sumber- sumber dana yang merupakan sumber dana sekolah. setelah mengetahui sumber dana yang ada selanjutnya sekolah membuat RAPBS. Sedangkan pelaksanaan manajemen keuangan meliputi asas pemisah tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Untuk pertanggungjawaban/pelaporan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Hal tersebut dilakukan agar dapat membuat suatu lapoan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

a. Perencanaan

Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, dengan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Menurut Nanang Fattah kegiatan penyusunan perencanaan anggaran pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu.²⁴

²³ Sulistryorini, "*Manajemen Pendidikan Islam*". Kalimedia,2016. Hlm. 221-223

²⁴ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2000,47

Dalam penyusunan anggaran pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada. Seperti pada teori Blocher dalam Anwar yang dikutip oleh Sukma dan Nasution bahwa proses perencanaan penganggaran melibatkan pihak informal di lembaga-lembaga kecil pemerintah baik itu bersumber dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.²⁵

b. Pelaksanaan

Menurut Jones mengatakan bahwa *implementation involves accounting* atau pelaksanaan anggaran adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Pada proses pengelolaan keuangan pendidikan harus dilaksanakan sesuai prinsip manajemen pembiayaan, yakni transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien.²⁶ Pelaksanaan anggaran sekolah setidaknya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan keuangan sekolah sendiri berasal dari berbagai sumber-sumber dana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada tiga sumber dana pendidikan yaitu: pemerintah pusat,

²⁵ Adriana Hanny Bella Sukma dan Alifia Maharani Nasution, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi" *Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4 Nomor 1, March-September 2022, 52-53

²⁶ E. Mulyasa, "Manajemen Berbasis Sekolah" (Bandung: Remajai Rosdakarya, 2011), hlm.171

pemerintah daerah, dana dari masyarakat.²⁷ Bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat yang sangat membantu sekolah dalam meningkatkan pelayanan mutu pendidikan. Sedangkan pengeluaran keuangan harus disesuaikan dengan yang sudah tertulis dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pengeluaran juga harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan. Jadi jika ada pemasukan atau pengeluaran, harus disertakan dalam pembukuan yang tertulis sehingga dapat memudahkan bagi siapapun dan meminimalisir terjadinya pengeluaran yang menyeleweng.

c. Pertanggungjawaban/pelaporan.

Pertanggung jawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwildayanto dkk, Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, satu tahun sekali atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada: kepala dinas pendidikan, kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain.²⁸ Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian

²⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

²⁸ Arwildayanto dkk. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan :Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo* (Padjajaran :Widya , 2017). H. 24.

efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.²⁹ Seperti pada buku Arwildayanto bahwa transparansi berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan.³⁰

3. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Di samping itu Tim Dosen Administrasi Pendidikan FIP (UPI Bandung) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan, antara lain 1) menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, 2) memelihara barang-barang (asset) sekolah, 3)

²⁹ Syaifullah, Manajemen Keuangan Pendidikan. *Journal of Pedagogy*, Volume 4, Number 1, 2021: 11-17

³⁰ Arwildayanto dkk. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*,... h: 10

menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.³¹

4. Sumber- sumber Manajemen Keuangan Pendidikan

Sumber Keuangan Sekolah Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada tiga sumber dana pendidikan yaitu:

a. Pemerintah Pusat

Adalah dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat yang didapatkan dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan berasal dari hibah (Pasal 11 ayat 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).³²Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Bab VI Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 61 bahwa seluruh dana pendidikan pemerintah dikelola sesuai dengan sistem anggaran pemerintah.³³

b. Pemerintah Daerah

Adalah dana pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah yang didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.³⁴

³¹ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. 2017, Hlm. 24

³² Undang- Undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

³³ Undang- Undang nomor 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan

³⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

c. Dana dari Masyarakat

Dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang dimaksud dengan masyarakat meliputi: Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.³⁵

Adapun menurut Nanang Fatah sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha dan alumni.³⁶ Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber keuangan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat dapat juga berarti pangkat, taraf dan kelas. Peningkatan secara umum berupa kemajuan , dan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. Juga sebagai penambah kemampuan, keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi

³⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

³⁶ Nanang Fatah, Standar Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2012), hlm.

lebih baik. Contoh peningkatan kualitas belajar, peningkatan keterampilan menulis, peningkatan kreatifitas hasil belajar.

Dalam contoh di atas peningkatan menunjukkan keterampilan dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Perubahan dari sifat negatif ke positif menggambarkan suatu peningkatan pada sifat seseorang dan kuantitas dan kualitas adalah pengukur tingkat pendidikan. Kualitas yaitu nilai-nilai yang menggambarkan suatu objek pendidikan agar tercapainya tujuan pada titik tertentu adalah suatu peningkatan, sedangkan kuantitas adalah data statistik dari sebuah proses pendidikan.³⁷

1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya merujuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik ataupun yang lain, serta lulusan relevan dengan tujuan.³⁸

Maksud dari paparan di atas sekolah atau madrasah yang bermutu mempunyai beberapa indikator yaitu : Pertama , jumlah siswa yang banyak ini sangat menandakan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi terhadap lembaga pendidikan. Kedua, memiliki prestasi akademi

³⁷ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. "Ilmu & Aplikasi Pendidikan" edisi ke 2(Bandung : PT Imperial 2017), jurnal ilmiah FKIP universitas Subang, Vol.4 (1 februari 2017) 11-13

³⁸ Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visonary Leadership, Menuju sekolah Efektif. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 5

maupun non akademi. Ketiga, lulusan relevan dengan tujuan lembaga pendidikan, artinya sesuai standar yang telah ditentukan oleh sekolah atau madrasah.

Mutu menciptakan lingkungan baik pendidikan, pebisnis, pejabat pemerintah, wakil masyarakat dan orang tua untuk bekerja sama guna untuk memberikan peluang dan harapan masa depan para peserta didik. Setiap orang menginginkan, mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain, sebaliknya orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari kita. Ini artinya, mutu tidaklah sesuatu yang baru, karena mutu adalah naluri manusia.

Mutu secara esensial digunakan untuk menunjukan kepada suatu penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (produk) dan atau jasa (*service*) tertentu, berdasarkan pertimbangan obyektif atas bobot dan kinerjanya. Mutu adalah suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan.³⁹

³⁹ Amrullah Aziz, "Peningkatan Mutu Pendidikan" Jurnal Studi Islam, Vol. 10, No. (2 Desember 2015). 1

2. Standar Mutu Pendidikan

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu:⁴⁰

a. Standar Isi

PP No. 19 tahun 2005 tentang standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi (kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran dan silabus pembelajaran) untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi terdiri atas kerangka dasar dan struktur kurikulum, kurikulum tingkat satuan pendidikan, beban belajar, kalender pendidikan atau akademik. Kurikulum untuk madrasah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, kelompok mata pelajaran estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Beban belajar untuk SMA/MAN disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas masing – masing sekolah, menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka dan penugasan terstruktur. Kalender pendidikan atau akademik mencakup permulaan awal tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Indonesia

b. Standar Proses

Standar ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu – satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Menurut Permendiknas RI No.41 Tahun 2007 ruang lingkup standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengawasan proses pembelajaran.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 pasal 1 ayat (4) standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. SKL pada satuan pendidikan menengah memiliki tujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, kepribadian, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik pada SMA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan memiliki sertifikat profesi guru untuk SMA dan MA.

e. Standar Pengelolaan

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 Bab VIII pasal 49 – 61 menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemitraan, kemandirian, akuntabilitas, partisipasi dan keterbukaan. Setiap

sekolah harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, struktur organisasi, kalender pendidikan/akademik, peraturan akademik, pembagian tugas diantara pendidik, pembagian tugas diantara tenaga kependidikan, tata tertib satuan pendidikan (tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana).

Kode etik hubungan antara sesama warga dilingkungan sekolah dan masyarakat, serta biaya operasional satuan pendidikan. Setiap sekolah di jalankan atas dasar RKT (Rencana Kerja Tahunan) (penjabaran rinci dari rencana kerja menengah sekolah meliputi masa 4 tahun).

f. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi (biaya penyediaan sarpras, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasional (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai dan biaya operasi pendidikan langsung berupa daya, pemeliharaan sarpras, uang lembur, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya) dan biaya personal (biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan).

Standar ini mengatur komponen dan besarnya biaya operasi sekolah yang berlaku dalam satu tahun.

g. Standar Penilaian Pendidikan

Standar ini berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tersebut dilakukan pendidik secara berkesinambungan untuk memonitor proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, tengah semester, semester, dan kenaikan kelas.⁴¹

Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pelaksana penilaian dan aspek kompetensi yang akan dinilai. Bentuk-bentuk penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Penilaian yang dilakukan pendidikan dapat berupa ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya yang relevan dengan kompetensi yang akan dinilai.

Penilaian oleh pendidik bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada setiap materi pelajaran. Penilaian oleh pendidik juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas bagi peserta didik.⁴²

⁴¹ Asmena. Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Kepemimpinan Kepala Madrasah . (2021). Hlm. 17-19

⁴² Noven Kusainun. Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. (2020). Hlm. 4

3. Indikator Mutu Pendidikan

Kualitas atau mutu pendidikan terdiri dari beberapa indikator, diantaranya yaitu :

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik merupakan profesi yang banyak dikenal yang praktisnya terbuka bagi semua yang ingin berjuang untuk mencapai tujuannya dan menguasai persyaratan untuk mencapai praktik yang kompeten. Pendidik adalah profesi yang mempercayai bahwa semua orang sederajat karena para praktisinya menggunakan keahlian dan spesialisasi bukan sebagai instrumen dari status dan kekuatan, tetapi sebagai sumber daya bersama bagi kelompok.

Sedangkan Tenaga kependidikan meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, teknisi, psikolog, pekerja sosial, terapis, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan yang bertugas menjadi pengawas di jalur pendidikan formal ialah pengawas sekolah, sedangkan di jalur pendidikan nonformal ialah penilik. Pendidik dan tenaga kependidikan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan.

Dengan adanya kualitas tenaga pendidik yang kompeten, akan mempengaruhi minat belajar peserta didik dan meningkatkan prestasi peserta didik. Tenaga kependidikan juga sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Pengelolaan SDM secara efektif oleh

tenaga kependidikan juga akan mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tenaga pendidik.⁴³

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan pemenuhannya, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb.

Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya: Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dan sebagainya. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa Administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tersebut.⁴⁴

⁴³ Israpil. Kualitas Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah, 2018

⁴⁴ Dwi Iwan, dkk. Pentingnya Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 2022. Hlm. 61

c. Prestasi Siswa

Prestasi belajar adalah hasil belajar pencapaian yang diperoleh seseorang pelajar setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Prestasi belajar diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum pada buku rapor, atau kartu hasil studi. Dalam pendidikan menengah (SMP, SMA, atau SMK) setiap guru mata pelajaran berperan penting dalam menyampaikan hasil belajar yang diperoleh setiap siswa dikelas yang diajarnya.

Hasil prestasi belajar ini dapat dimanfaatkan untuk memantau bagaimana taraf kemajuan atau kemunduran, yang dialami setiap siswa selama mereka mengikuti pengajaran yang diasuh oleh guru-guru mata pelajaran. Dengan hal tersebut dapat mengukur prestasi siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan.⁴⁵

d. Kurikulum

Kurikulum mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan tujuan dan sarana pendidikan yang di cita-citakan. Kurikulum sendiri merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses dan mengajar di dunia pendidikan.

⁴⁵ Intan Erieca, Manajemen Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Di Madrasah, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung) 2020. Hlm.36

Jika kurikulumnya di desain dengan sistematis dan komprehensif dengan segala kebutuhan pengembangan dan pengajaran anak didik untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasil output pendidikan itupun akan mampu mewujudkan harapan. Kurikulum akan berjalan efektif dan efisien jika dilaksanakan oleh guru yang memiliki kemampuan professional.⁴⁶

⁴⁶ Devy Nur. Peran Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 2020